

**KONSTRUKSI INDEPENDENSI AUDITOR DALAM PERSPEKTIF SYARIAT
ISLAM**

(Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Peryyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Yuhardiansyah

2014/14043086

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KONSTRUKSI INDEPENDENSI AUDITOR DALAM PERSPEKTIF
SYARIAT ISLAM**

(Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang)

Nama : Yuhardiansyah
NIM/TM : 14043086/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Audit
Fakultas : Ekonomi

Padang, 27 November 2019

Disetujui Oleh,
Pembimbing I



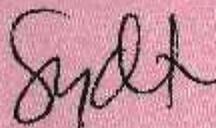
Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak., CA
NIP. 19800327 200501 2 002

Disetujui Oleh,
Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Pb.D, Ak., CA
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

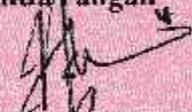
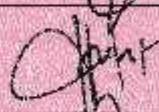
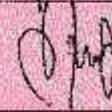
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**KONSTRUKSI INDEPENDENSI AUDITOR DALAM PERSPEKTIF
SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang)**

Nama : Yuhardiansyah
NIM/TM : 14043086/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Audit
Fakultas : Ekonomi

Padang, 27 November 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Herlina Helmy, SE, Ak., M. S. Ak., CA	1. 
2	Sekretaris	: Salma Taqwa, SE., M.Si	2. 
3	Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 
4	Anggota	: Nurzi Sebrina, SE., Ak., M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuhardiansyah
NIM/ Th. Masuk : 14043086/2014
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 23 Juli 1996
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Audit
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Srigunting No.3 Air Tawar Barat, Padang
Utara Kota Padang
No. Hp/Telephone : 081378941133
Judul Skripsi : Konstruksi Independensi Auditor Dalam
Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Pada Auditor
Kap Kota Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 27 November 2019



Penulis

Yuhardiansyah

ABSTRAK

Yuhardiansyah, 14043086/2014. “Konstruksi Independensi Auditor Dalam Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang).”

Pembimbing : 1. Herlina Helmy, SE., Ak., M.S.Ak., CA
2. Salma Taqwa, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara ilmiah mengenai (1) perspektif auditor muslim dalam memaknai independensi auditor, (2) perbandingan cara memaknai independensi, antara auditor muslim dengan auditor non muslim, dan (3) nilai-nilai yang memperlemah dan nilai-nilai yang memperkuat independensi auditor.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif, konsep independensi dieksplorasi menggunakan pendekatan interaksi simbolik Blumer atau *Chicago School of Symbolic Interactionism* (CSSI). Metode wawancara dengan beberapa auditor muslim dan non-muslim digunakan untuk mengumpulkan data. Triangulasi teori digunakan untuk menguji keabsahan data wawancara, sedangkan *coding* terhadap data digunakan untuk mempermudah proses interpretasi data.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) definisi independensi berdasarkan perspektif auditor muslim dan non-muslim meliputi sikap dan pola hubungan, (2) nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang terkandung pada syariat Islam yang dapat memperlemah independensi dan memperkuat independensi.

Kata kunci: independensi auditor, konstruksi, nilai – nilai Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, sang pencipta, pemilik dan pemelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Berkat izin dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan pembawa kebebasan dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang terang benderang bagi kita semua.

Skripsi dengan judul “Konstruksi Independensi Auditor Dalam Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Mama & Almarhum Papa tercinta, yang telah memberikan doa sekaligus motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau terkhususnya untuk almarhum Papa atas keterlambatan penulis untuk lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk motivasi yang eksentrik dan

unik dari adikku Crisman yang selalu memberikan tawa untuk mengusir kejenuhan pada pembuatan skripsi. Terimakasih untuk Maharani Rahmafritri (Unii) yang selalu memberikan motivasi serta menjadi partner WiFi Id dan teman curhat pada masa-masa penyusunan skripsi.

2. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan settiap semester mengenai perkuliahan.
3. Ibu Herlina Helmy, SE., Ak., M.S.Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis.
4. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M. Sc selaku dosen penguji I dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc. selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan jalan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si.Ak, CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Vita Fitria Sari, SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi atas semua bantuan yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) kota Padang yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian.

8. Para dosen, staf penunjang dan seluruh civitas akademika Jurusan Akuntansi serta Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas ilmu, waktu dan bantuan yang telah diberikan.
9. Para penghuni Kos Astam yang telah memberikan arti sebuah pertemanan. Terima kasih kepada Fauzi Botak, Bima Big, Fauzan, Ridho Ayam, Adel Riviando, Tio Amri, Hafizul, Bagus Siputra, Hanafi, dan semua member kos Astam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
10. Kamerad seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IE UNP, yang selalu bertanya kapan kompre dan kapan wisuda.
11. Teman-teman SMA yang tergabung dalam Rohis SMAN 91 Jakarta dan khususnya kepada teman-teman PJ Cerum yang memberikan doa serta motivasinya yang tidak mengenal jarak serta waktu.

Penulis meminta maaf dan mengharapkan saran serta kritikan yang membangun untuk perbaikan bagi penulis. Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Padang, 16 Oktober 2019

Yuhardiansyah

14043086

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II Landasan Teori, Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Interaksi Simbolik	11
2.1.2 Teori Independensi Auditor	16
2.1.3 Konsep Manusia Dalam Islam	22
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III Metodologi Penelitian	
3.1 Desain Penelitian	32
3.1.1 Pemilihan Desain Penelitian	32
3.1.2 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumbar Data	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Sumber Data	35
3.3 Tempat Penelitian	37
3.4 Analisis Data	37
3.4.1 Metode Pengumpulan Data yang Digunakan dalam Penelitian.....	38
3.4.2 Teknik Analisis Data.....	39
3.4.3 Triangulasi.....	41

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Definisi Independensi	43
4.1.1 Defenisi Independensi dalam Perspektif Auditor Muslim	45
4.1.2 Defenisi Independensi dalam Perspektif Auditor Non – Muslim ..	46
4.2 Independensi Auditor dalam Perspektif Islam	47

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan Penelitian	63
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran	64
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran	72

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	36
Tabel 2.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran.....	72
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit adalah suatu proses mencari, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti transaksi ekonomi suatu perusahaan untuk memastikan dan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Pekerjaan audit dilakukan oleh auditor.

Auditor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan perusahaan secara berkala. Auditor adalah akuntan yang bersertifikat dan melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non komersial (Arens, 2014:19). Auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan mengapa pemakai laporan keuangan ingin mengandalkan laporan keuangan publik karena ekspektasinya terhadap sudut pandang yang tidak bias (Arens, 2014:102). Proses pelaksanaan audit telah diatur di dalam standar audit. Standar umum audit mengharuskan auditor memiliki kompetensi, kecermatan, dan independensi.

Konsep independensi auditor memiliki sejarah panjang dan masih tetap menjadi konsep yang diperdebatkan saat ini. Konsep independensi ini dikaitkan dengan karakter seorang auditor dan keadaan pikiran auditor melalui desakan dari tugas dan loyalitas, oleh karena itu independensi dianggap berarti integritas, kejujuran, dan objektivitas, termasuk kebebasan dari kendali mereka yang catatannya sedang ditinjau. Independensi merupakan Sikap pikiran, jauh lebih dalam dari tampilan yang terlihat (Carey dan Doherty 1966: 39 dalam Hudaib dan

Haniffa, 2008). Pembahasan mengenai konsep independensi auditor kemudian dibagi atas dua komponen yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2018). Independensi dalam pemikiran mengharuskan auditor untuk membentuk dan mengungkapkan opini dalam laporan audit sebagai pihak ketiga independen dan ahli, serta tidak dipengaruhi oleh segala hal yang menimbulkan bias selama perikatan audit (Arens *et al.*, 2014:74), sedangkan pada penelitian lain mengharapkan auditor untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan atau pihak lain menyimpulkan bahwa auditor tidak mempertahankan sikap objektifnya (Porter *et al.*, 2003).

Konsep independensi merupakan konsep yang tidak dapat diukur secara statistik sama halnya dengan perubahan-perubahan yang ada didalam lingkungan kerja (Wyatt, 2004). Independensi auditor dianggap sebagai posisi moral-etis yang diatur oleh regulator seperti International Federation of Accountant (IFAC) melalui standar yang diumumkan dalam kode etik (Gendron *et al.*, 2006) atau di Indonesia, standar dan kode etik tersebut disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar dan kode etik tersebut secara berkala diperiksa dan diverifikasi melalui *review* oleh regulator tersebut (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2018). Berbagai macam upaya dari badan-badan profesional di negara-negara maju dalam menangani berbagai ancaman dan perlindungan terhadap independensi auditor melalui berbagai kode, misalnya *Code of Conduct* (AS), *Members' Handbook* (Inggris) dan Kode Etik Profesi Akuntan (IFAC) dan beberapa regulasi lainnya. Pada kenyataannya auditor masih rentan terhadap

skandal perusahaan (Turner, 2006), namun kode etik dan peraturan ini dianut oleh banyak negara-negara berkembang. Negara tersebut yaitu negara yang sedang mengalami transisi dari ekonomi dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi pasar, seperti di Eropa Tengah dan Timur dan Cina (Sucher, 2001; Sucher, 2002; Kosmala, 2007) sebagai bagian dari proses globalisasi.

Penelitian yang membahas independensi auditor sebagian besar berkonsentrasi pada membuktikan fakta-fakta empiris yang ada ketimbang mengeksplorasi lebih mendalam mengenai persepsi praktisi audit dalam hal ini yaitu auditor itu sendiri (Hudaib & Haniffa 2008), khususnya penelitian-penelitian mengenai independensi auditor di Indonesia (Meutia, 2004; Herawaty, 2010; Juliarsa, 2014). Hasil penelitian tersebut sebagian besar belum mampu untuk mempertimbangkan banyak faktor lain dalam konteks negara yang diteliti terutama Indonesia, seperti agama, struktur politik dan sosial-ekonomi, budaya organisasi dan nilai-nilai sosial serta individu yang mungkin mempengaruhi pemaknaan atau persepsi individu dalam memaknai suatu hal atau fenomena (Puxty, 1993; Puxty *et al.*, 1997; Abd-Elsalam & Weetman, 2003; Evans, 2004; Efferin & Rudiawarni, 2014) pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin mengganggu independensi auditor.

Memahami konteks independensi dinilai penting, karena independensi auditor tidak hanya konsep teknis, tetapi juga konsep kognitif dan budaya (Wolnizer, 1987). Studi berbasis konteks dalam audit sekarang menerima lebih banyak perhatian. Tinjauan kritis terhadap studi kontekstual yang terkait dengan peran audit dan produksi legitimasi di sekitar empat tema utama demikian pula

penelitian dengan konteks kultur dan budaya dalam mempengaruhi independensi auditor (Power, 2003) seperti penelitian (Hao, 1999) tentang China; (Sucher dan Bychkova, 2001), tentang Rusia; (Sucher dan Kosmala, 2004) pada Republik Ceko; (Kosmala, 2007) tentang Polandia dan Republik Ceko.

Penelitian berbasis konteks dalam memaknai independensi juga sudah dimulai di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut berkonsentrasi pada eksplorasi mendalam mengenai persepsi auditor di Indonesia dengan mempertimbangkan konsep kognitif dan budaya yaitu Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blummer (Kalana *et al.*, 2012); Independensi Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi (Aripoerwo, 2014); Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Siri' Na Pacce* (Azis, Mangoting dan Lutfillah, 2015).

Terlepas dari pertumbuhan literatur mengenai audit pada studi berbasis konteks, ada sedikit upaya dalam memahami bagaimana pemaknaan konsep audit seperti independensi auditor dibangun dalam konteks yang berbeda seperti model Anglo-Amerika demokratis, terutama kapitalis, kecenderungan yang lebih kuat untuk melindungi pemegang saham, badan akuntan profesional yang memiliki pengaruh, mengandalkan istilah seperti "*true and fair*" berdasarkan pertimbangan substansi ekonominya (Knapp, 1985; Gorman & Ansong, 1998). Eropa kontinental memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk melindungi kreditor, ketergantungan yang lebih kuat pada pemerintah dengan input kecil dari profesi akuntan, dominasi aturan pajak. Negara dengan model ekonomi transisi yang mengalami perubahan dalam ideologi politik dan sistem ekonomi seperti di

kawasan Tengah dan Eropa, Rusia dan Cina (Hao, 1999; Sucher & Bychkova, 2001; Sucher & Kosmala, 2004; Kosmala, 2007). Negara model ekonomi berkembang lainnya seperti di Indonesia (Irmawan, 2013), Malaysia dan Singapura (Teoh & Lim, 1996) dengan kondisi semi-demokrasi, dominasi kapitalis asing dan pemodal lokal, intervensi pemerintah yang kuat dengan input yang besar dari badan-badan internasional, serta kondisi pasar modalnya semi-kuat.

Auditor sebagai individu, kelompok dan sub-kelompok, melalui interaksinya mengkonstruksikan atau memaknai sesuatu hal atau fenomena berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan interpretasi dari lingkungan dan tindakan mereka (Herbert & Blumer, 1986). Pendekatan interpretif dapat memberikan kerangka berfikir yang diperlukan untuk menyelidiki bagaimana makna independensi auditor dibangun oleh auditor muslim di kota Padang dan jika konstruk tersebut memang berbeda dari berbagai negara dan daerah di Indonesia.

Pendekatan interpretif berfokus pada persepsi individu tentang realitas dan pemaknaan individu (Hopper dan Powell, 1985; Hopper *et al.*, 1987), dan berakar pada hermeneutika interpretasi makna (Puxty, 1993) dan tradisi *verstehen* atau tafsir pemahaman atas makna terhadap kumpulan kegiatan yang dialami oleh individu dalam sosiologi (Herbert & Blumer, 1986). Pendekatan sosial tersebut meliputi teori dasar, etnometodologi, yang berfokus terutama pada praktik sosial sehari-hari para auditor dan bagaimana auditor tersebut memilih untuk melakukan apa yang mereka lakukan (Chua, 1988); antropologi kognitif, yang berfokus pada kompetensi komunikatif individu dalam budaya tertentu (Jonsson dan Macintosh,

1997) dan interaksi simbolik, yang memberi perhatian khusus pada konsep dan simbol yang digunakan pelaku sosial dalam penelitian ini yaitu auditor untuk menjalankan kehidupan sosial mereka. Peneliti tertarik untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial terutama dari sudut pandang pelaku sosial yang terlibat langsung dalam proses sosial (Burrell dan Morgan, 1979). Peneliti mengadopsi pendekatan interpretif berdasarkan *Chicago School of Symbolic Interactionism* (CSSI) untuk mempelajari fenomena tersebut, karena pendekatan tersebut membantu peneliti untuk mengetahui beberapa kompleksitas dan keberagaman lingkungan di mana praktek audit tersebut berlangsung (Parker dan Roffey, 1997).

Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan atau *gap* pada literatur audit di Indonesia khususnya mengenai independensi auditor dengan mengeksplorasi bagaimana makna independensi auditor dibangun dalam konteks masyarakat muslim khususnya dalam penelitian ini auditor muslim yang berada di kota Padang. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana auditor mengartikulasikan gagasan independensi auditor dalam konteks interaksi sosial mereka dalam lingkungannya, menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai studi kasus. Auditor muslim kota Padang dipilih karena selain kemudahan dalam pengumpulan data, yaitu karena auditor kota Padang mayoritas bersuku Minangkabau, apabila auditor tersebut berasal dari suku minangkabau, auditor tersebut sudah dipastikan muslim atau memeluk agama Islam (Amir, 2011:133), sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau “*adaik bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*”, kurang lebih bermakna, adat yang didasarkan atau

ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Qur'an dan Hadits. Falsafah hidup tersebut dikuatkan dengan falsafah lainnya yaitu *syarak mangato adat mamakai*, (Syarifuddin, 1982:173). Falsafah hidup masyarakat Minangkabau tersebut diasumsikan bahwa auditor muslim sangat kuat dalam menjalankan syariat Islam dan mengamalkan nilai-nilai dari syariat Islam tersebut.

Syariat Islam dan nilai-nilainya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an adalah firman Allah S.W.T yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, sedangkan hadits adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan akhlak. Al-Qur'an dan hadits menjelaskan tentang kejujuran, amanah, integritas, komitmen, adil, dan tanggungjawab. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan independensi menurut kode etik, yaitu independensi menurut pemikiran dan penampilan. Auditor yang memiliki nilai-nilai Islam, apakah mungkin seorang auditor berani merusak independensinya? Mungkinkah nilai-nilai Islam menjaga independensinya? Auditor yang mengamalkan syariat Islam dan memegang teguh nilai-nilai Islam takut untuk melanggar independensi. Auditor tersebut takut mendapatkan sanksi dari Allah.

Peneliti mengindikasikan bahwa auditor muslim kota Padang cenderung independen karena menganut dan mengamalkan syariat serta nilai-nilai Islam baik dalam mengaudit maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai yang peneliti identifikasi sebagai nilai-nilai yang akan mempengaruhi independensi auditor yaitu tolong menolong sesama muslim, toleransi, kejujuran,

tanggungjawab, keadilan, dan objektivitas, selanjutnya peneliti juga mengindikasikan adanya perbedaan dalam pemaknaan independensi auditor antara auditor muslim dengan auditor non muslim. Auditor muslim di indikasikan cenderung independen ketimbang auditor non muslim karena nilai-nilai dan syariat Islam yang dimiliki oleh auditor muslim tersebut.

Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai auditor di 4 KAP dengan 6 auditor yang berbeda-beda selama total 14 hari untuk membangun pemahaman keseluruhan tentang apa yang mempengaruhi interpretasi auditor tersebut untuk membangun makna independensi auditor dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wawancara juga dilakukan untuk memahami dan menafsirkan keadaan sosial, historis dan budaya.

Peneliti membentuk gagasan independensi auditor untuk diartikulasikan dalam seperangkat karakteristik yang mencerminkan realitas sosial tertentu. Faktor-faktor seperti struktur politik dan sosial ekonomi dan ranah keindahan budaya seperti nilai-nilai dan norma-norma sosial, filsafat, kepercayaan agama, dan prinsip-prinsip etika, akan menetapkan batas-batas di mana para pelaku sosial atau dalam hal ini auditor berinteraksi dan mengembangkan tindakannya. Dalam suatu organisasi interaksi dalam tim audit dan antara auditor dengan atasan mereka dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Refleksi diri akan membantu individu dalam menafsirkan simbol dan makna dan untuk melihat diri mereka dari perspektif orang lain. Faktor-faktor ini diharapkan berdampak pada interpretasi makna independensi auditor dalam konteks lokal. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada latar belakang ini peneliti tertarik melakukan penelitian yang

berjudul “**KONSTRUKSI INDEPENDENSI AUDITOR DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM (Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka beberapa masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana auditor KAP kota Padang khususnya yang beragama Islam mengkonstruksi atau memaknai independensi?
2. Bagaimana nilai-nilai Islam yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi konstruksi atau pemaknaan independensi?
3. Bagaimana perbandingan auditor yang memiliki nilai-nilai Islam dengan auditor yang tidak memiliki nilai-nilai Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Mengetahui konstruksi (pemaknaan dan penilaian) independensi auditor yang beragama Islam dan berasal dari suku Minangkabau.
2. Mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi konstruksi atau pemaknaan independensi.
3. Mengetahui perbandingan cara memaknai independensi, antara auditor yang memiliki nilai-nilai Islam dengan auditor yang tidak memiliki nilai-nilai Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, seperti :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi yang bertanggungjawab atas kepercayaan masyarakat untuk menjaga sikap dan perilakunya, dan untuk menyikapi perbedaan sudut pandang dengan memegang teguh nilai – nilai kebenaran.

3. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menginformasikan kepada regulator dalam menilai independensi juga mempertimbangkan dan memperhitungkan sistem tatanan agama, budaya dan sosial, sehingga nantinya peraturan dapat menyesuaikan dengan kebudayaan lokal dan independensi benar – benar ditegakkan.

BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN SEBELUMNYA DAN KERANGKA
PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Interaksi Simbolik

Grand Theory dari penelitian ini yaitu teori interaksi simbolik yang diperkenalkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer (1986). Mead dan Blumer (1986) melihat bahwa individu adalah objek yang bisa dianalisa dan ditelaah secara langsung melalui interaksinya dengan individu lain. Hasil penelitian Herbert dan Blumer (1986) mengemukakan bahwa individu - individu tersebut berinteraksi menggunakan simbol - simbol yang didalamnya terdapat tanda - tanda, isyarat dan kata - kata. Simbol tersebut adalah sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol tersebut meliputi kata - kata (pesan verbal), perilaku non - verbal, dan objek yang disepakati bersama.

Herbert dan Blumer (1986) mengemukakan ada tiga asumsi yang mendasari tindakan manusia. Tindakan tersebut yaitu :

1. Manusia bertindak sesuai makna dasar yang dimiliki objek yang dimaknainya
2. Makna dari objek tersebut muncul dari interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya.

3. Makna dari objek tersebut dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan oleh individu tersebut dalam berurusan dengan hal yang individu tersebut temui.

Individu memiliki tindakan terhadap sesuatu, baik sesuatu tersebut benda, fenomena, atau kejadian bagi manusia. Individu cenderung merespon sesuatu situasi secara simbolik. Individu merespon lingkungan termasuk objek fisik dan objek sosial (perilaku individu) berdasarkan makna yang terkandung didalam objek yang di maknainya atau yang dikenal juga dengan proses interpretasi.

Makna yang diberikan oleh individu adalah hasil interaksi dengan sesamanya. Makna tersebut tidak inheren atau tidak terlekat pada benda ataupun fenomena itu sendiri, melainkan tergantung pada individu - individu yang terlibat dalam interaksi itu. Makna tersebut disepakati melalui penggunaan bahasa. Kesepakatan tersebut memungkinkan individu mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu namun juga gagasan yang abstrak. Nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, atau gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Melalui penggunaan simbol tersebut individu dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

Pemaknaan tersebut digunakan dan dimodifikasi melalui proses interpretasi dalam rangka menghadapi fenomena tertentu dan fenomena lainnya. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah seiring

berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) dinilai sangat tepat untuk mengeksplorasi lebih mendalam bagaimana berbagai kelompok dalam masyarakat bertindak terhadap lingkungan mereka. Interpretasi setiap individu terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi dan bagaimana individu tersebut mengatur tindakan mereka berdasarkan interpretasi dari diri individu itu sendiri, atau makna langsung dari konsep independensi auditor kepada auditor itu sendiri. Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) juga mengakui bahwa makna yang melekat pada setiap konsep tertentu ialah dinamis dan hanya dapat dipahami dalam konteksnya dan karena itu memberikan perhatian substansial terhadap keadaan sosial, sejarah dan budaya. Terdapat tiga premis untuk Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) ini, yaitu anggota masyarakat bertindak terhadap hal-hal sesuai dengan persepsi mereka (makna) dari fenomena tersebut, persepsi dibentuk berdasarkan bahasa (simbol) dalam interaksi sosial individu tersebut, dan persepsi serta tindakan individu tersebut dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretasi ketika berhadapan dengan fenomena (Blumer, 1986). Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) mengakui bahwa masyarakat bukanlah entitas yang homogen dan mengasumsikan bahwa pemahaman masyarakat membutuhkan pemahaman tentang individu yang membuatnya dan sebaliknya (Meltzer *et al.*, 1975). Menurut Blumer (1986), CSSI mengakui manusia sebagai makhluk yang

reflektif. Sifat dan perilaku manusia tidak hanya didorong oleh kekuatan dalam diri mereka sendiri (misalnya naluri, dorongan, kebutuhan, dsb.) atau oleh kekuatan eksternal yang mempengaruhi individu tersebut (misalnya politik, sosial atau sistem ekonomi, dll.), tetapi juga apa yang ada di antaranya. Oleh karena itu, CSSI melihat makna sebagai produk sosial yang berasal dari interaksi sosial, yaitu makna hal-hal untuk setiap individu dibentuk bersama-sama dengan konteks interaksinya di berbagai tingkatan.

Tiga konsep penting dalam yaitu interaksi sosial, sikap kolektif dan pemisahan fungsi serta tugas (Blumer, 1986). Proses interaksi sosial ialah dimana individu belajar menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan lingkungan individu tersebut yang memiliki pandangan dunia yang sama dengan interpretasi kolektif atau dengan menyesuaikan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam sebuah contoh kasus misalnya, seorang auditor sering memiliki pendapat sendiri tentang berbagai hubungan auditor dengan klien. Auditor tersebut akan menemukan situasi atau aturan baru, auditor tersebut akan mendefinisikan ulang pendapatnya mengenai hubungan auditor dengan klien tersebut berdasarkan interaksi dengan orang lain, dalam kasus ini misalnya auditor lain, regulator, klien, dll., agar sesuai dengan tindakannya terhadap orang lain. Sikap kolektif mewakili perilaku kolektif dari beragam individu dalam proses negosiasi ketika situasi baru muncul. Dalam kasus yang berbeda misalnya, auditor dan kolega profesionalnya sedang melalui proses negosiasi, mereka sudah dapat dipastikan mengambil tindakan bersama untuk menerima atau menolak aturan baru atau

praktik yang disarankan. Pemaknaan tersebut dibentuk melalui proses interaksi dan negosiasi, tingkat pemisahan fungsi serta tugas yang tertanam dalam struktur dan institusi yang dimiliki oleh berbagai pelaku sosial mungkin tidak hanya mempengaruhi fenomena tetapi juga mengubah makna dari fenomena tersebut. Perubahan makna dan tindakan yang diambil individu, dapat dikaitkan dengan tingkat kekuatan negosiasi yang lebih tinggi yang dipegang oleh beberapa pelaku sosial dibandingkan dengan yang lain dalam proses negosiasi (misalnya otoritas, lokasi politik, kekayaan, kecerdasan, dll.) dan terhadap perubahan dalam lingkungan yang mengelilingi para individu (misalnya penemuan atau inovasi ekonomi baru, dll.). Pertimbangan dalam KAP dipengang oleh partner pelaksanaaudit dimana partner dalam KAP memegang posisi otoritas formal atas personil perusahaan lain, memiliki kekuatan untuk merekrut dan memecat staf tingkat bawah, dan menentukan hal-hal tertentu kepada staf tersebut. Staf tingkat bawah tersebut dapat dikeluarkan melalui proses “negosiasi” dan akan bertindak sesuai dengan harapan atau mengambil jalan keluar. Selain simbol, makna dan interaksi, konsep dasar lain dalam teori interaksi simbolik adalah reflektivitas diri. Manusia sangat aktif dan selektif memiliki pengaruh besar pada lingkungan dan dirinya sendiri. Bahasa dan kemampuan untuk menafsirkan simbol memungkinkan individu untuk melihat diri mereka dari perspektif orang lain dan inti dari konsep diri mencerminkan konten dan organisasi masyarakat.

2.1.2 Teori Independensi Auditor

Kata independensi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari kata "*independence*". Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat kata "*independence*" yang artinya "dalam keadaan independen". Kata "*independent*" bermakna "tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain". Makna independensi dari kata - kata yang terdapat pada kamus tersebut tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang digunakan dalam literatur pengauditan.

Pada pelaksanaan audit, auditor mendapatkan kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien, oleh karena itu dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan auditor itu sendiri. Menurut Arens (2014:102) nilai *auditing* sangat bergantung pada persepsi publik tentang independensi auditor. Pengguna laporan keuangan mengandalkan opini hasil audit laporan keuangan dengan alasan yakni ekspektasinya terhadap sudut pandang yang tidak bias. Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Apabila seorang auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) lalai atau gagal mempertahankan

sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

Kode etik profesi akuntan publik Indonesia (2018) mewajibkan anggota tim assurance, dan KAP dalam melaksanakan perikatan assurance untuk bersikap independen, sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik. Independensi yang diatur dalam kode etik, yaitu independensi dalam penampilan dan independensi dalam pemikiran. Kode etik menyatakan independensi dalam penampilan adalah sikap yang menghindari atau tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim assurance dan KAP. Independensi dalam pemikiran didefinisikan oleh kode etik sebagai sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal – hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seseorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional.

Kode etik mengartikan independensi sebagai bentuk gabungan dari integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Faktor – faktor yang dapat mengancam ketiga unsur tersebut dapat diartikan juga sebagai ancaman independensi. Setiap praktisi yang ingin melindungi independensinya maka

harus terhindar dari ancaman terhadap objektivitasnya. Faktor yang dapat mengancam objektivitas menurut kode etik adalah adanya kepentingan pribadi dan hubungan antara klien dengan auditor, misal hubungan bisnis atau hubungan keluarga. Hubungan – hubungan tersebut dinilai akan menimbulkan benturan kepentingan, terpengaruh pihak lain, dan pendapat yang bias atau terkesan bias. Kode etik juga melarang semua praktisi untuk melakukan penyimpanan aset klien, kecuali diperbolehkan hukum maka dilaksanakan dengan tidak melanggarnya. Penyimpanan aset tersebut dilarang karena dapat mengancam objektivitas dari praktisi.

Kode etik juga melarang praktisi untuk menerima hadiah atau keramah – tamahan dari klien supaya independensi dapat terjaga. Kode etik menyatakan praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau keramah – tamahan oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap objektivitas praktisi atau dapat mengintimidasi dengan ancaman dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut oleh klien. Praktisi juga dilarang untuk mengambil langkah – langkah yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, seperti memiliki usaha bersama, atau kerjasama untuk mengalahkan pesaing klien, memberikan jasa profesional selain dari assurance, mengaudit klien yang berkonflik dengan KAP. Praktisi juga dilarang memberikan jasa assurance kepada klien yang mempunyai kepentingan keuangan dengannya. Independensi akan terjaga ketika praktisi bebas dari hubungan khusus dengan klien berdasarkan pernyataan dari kode etik.

Kode etik profesi akuntan publik juga menyatakan, penggunaan kata “independensi” yang berdiri sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan pengamat beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan pertimbangan profesional harus bebas dari semua pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya. Independensi yang mutlak mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu dengan lainnya. Signifikansi setiap hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya harus dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan tersebut.

Beberapa ahli juga mencoba menguraikan independensi selain dari kode etik. Mulyadi (2002 : 32) misalnya menyatakan independensi berarti sikap mental yang bebas dari terpengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor itu sendiri untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Kemudian menurut Sukrino Agoes dan I Cenik Ardana (2009 : 146) independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Menurut Arens et al (2014 : 102-103) independensi adalah peraturan perilaku yang pertama, yang terdiri dari 2 komponen yaitu *independence in mind* dan *independence in appearance*. Arens menyatakan independensi

dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias, independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini, bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Arens et al (2014:103) mengatakan bahwa auditor akan terganggu independensinya ketika mantan karyawan kantor akuntan publik bekerja bersama dengan klien. Masa perikatan audit yang lama juga dapat mengganggu independensi auditor. Independensi dapat melemah ketika klien juga mendapatkan jasa non audit dari auditor. Jasa non audit yang dilarang karena dapat mengganggu independensi, yaitu jasa pembukuan dan akuntansi lain, perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penaksiran dan penilaian, jasa aktuarial, outsourcing audit internal, fungsi manajemen dan sumber daya manusia, jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi, serta jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit. Jasa – jasa tersebut sangat dilarang untuk diberikan kepada klien audit.

Independensi dalam kehidupan sehari - hari sangat sulit mengukur dan menilainya. Karena independensi merupakan konstruksi yang berlapis dan juga etika seorang auditor. Standar etika setiap orang berbeda – beda (Arens et al, 2014). Secara penampilan independensi dapat dinilai dengan hubungan – hubungan yang memungkinkan menimbulkan kecurigaan dan mengancam

independensi, seperti yang telah dijelaskan pada teori dan kode etik di atas. Auditor yang melanggar hubungan tersebut dapat diartikan tidak independensi. Namun, berbeda halnya dengan independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran yang lebih menekankan pada sikap sangat sulit untuk diukur dan dinilai. Auditor tidak bisa dicap begitu saja sebagai seorang yang independen atau tidak independen. Kerusakan independensi auditor selama ini sulit untuk dideteksi dini, kerusakan itu diketahui setelah terjadi skandal. Meskipun demikian para peneliti sebelumnya telah mencoba mengukur independensi dengan objektivitas auditor ketika diberikan pertanyaan (Rapina et al, 2010) kuesioner kasus (Patel et al, 2002) menghubungkan makna independensi dari perspektif auditor dengan perilakunya dalam kenyataan (Hudaib dan Haniffa, 2008). Penelitian ini menggunakan pertanyaan berupa kasus – kasus dalam menilai independensi auditor. Auditor yang mampu menjaga objektivitasnya yang tercermin dari jawaban kasus tersebut dipandang telah independen.

Dari berbagai interpretasi konstruksi makna independensi auditor di Arab Saudi, dapat disimpulkan bahwa konsep AI Anglo-Amerika dihargai oleh kapitalis lokal dan kolaborator asing mereka untuk memaksimalkan kepentingan mereka (Hudaib & Haniffa, 2008) namun, itu dianggap sebagai tidak diinginkan oleh mayoritas dalam masyarakat yang menempatkan agama sebagai titik fokus ketika melakukan tugas mereka, termasuk makna independensi auditor yang hidup. Ini menciptakan ketegangan antara dua kelompok dominan dalam masyarakat - "Islamis" dan sekuler atau "liberal".

Singkatnya, independensi auditor bukan hanya konsep teknis, tetapi juga konsep budaya dan agar efektif dalam konteks Arab Saudi, hal-hal berikut perlu diatasi: kebebasan berekspresi, mengadopsi nilai-nilai etika Islam, refleksi kebutuhan masyarakat, menangani korupsi, memiliki hakim yang kompeten dan memiliki badan profesional yang lebih independen dan berpengaruh (Hudaib & Haniffa, 2008).

Auditor yang berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal *siri'na pacce*, yang tercermin dalam prinsip utama yang disebut *Lima Akkateningeng* atau *Lima Passalen*, selalu taat pada kode etik profesi. Auditor tersebut memiliki harga diri yang tinggi, serta malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, malu karena mementingkan kepentingan pribadi (ekonomi) dan malu karena melanggar kepentingan umum, sehingga independensi auditor yang menjadi pondasi atau sebagai landasan dari profesi audit terus dapat terjaga (Azis, Mangoting dan Lutfillah, 2015).

2.1.3 Konsep Manusia Dalam Islam

Menurut Malisi (2012) ketidakmampuan manusia dalam menelusuri substansi dirinya secara utuh disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan manusia. Menurut Shihab dalam Malisi (2012) penyebab keterbatasan pengetahuan manusia terdiri dari tiga faktor yaitu, pertama dalam sejarah manusia, kehidupan manusia lebih tertarik melakukan penyelidikan tentang alam yang bersifat materi dibandingkan hal – hal yang bersifat immaterial. Kedua keterbatasan akal manusia mampu memikirkan hal – hal yang bersifat

instrumental ketimbang hal – hal yang substansial dan kompleks. Ketiga kompleksitas dan uniknya masalah manusia.

Istilah manusia dalam Al – Quran salah satunya yaitu *al – Insan*. Istilah ini menilai hakikat manusia sebagai *khalifah* di bumi dan manusia di nilai mampu memikul beban tugas keagamaan dan amanah kehidupan. Hanya manusia yang dibekali ilmu pengetahuan, berbicara, merencanakan, dan mampu mengambil keputusan sehingga manusia siap menghadapi ujian, cenderung pada kebaikan (*hanif*), mengatasi kesesatan dan berbagai persoalan hidup yang membuat kedudukan dan derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya.

Kata *al – Insan* dinyatakan dalam Al – Qur’an sebanyak 73 kali dan terdapat pada 43 surah. Dari berbagai ayat yang memaparkan keistimewaan dan ciri – ciri manusia, *al – Insan* adalah *khalifah* Allah S.W.T di muka bumi yang diberi tanggungjawab dan amanah karena ke khususannya yaitu dapat membedakan baik dan buruk (akal), memiliki ilmu, dan memiliki kemampuan berbicara (*al – Bayan*). Segala hal yang dikerjakan manusia mengandung resiko bersamaan dengan ujian – ujian yang akan menimpanya, baik ujian tersebut bersifat positif maupun bersifat negatif.

Istilah lain dalam Al – Qur’an untuk menyebutkan manusia yaitu *al – Nas*. Kata *al – Nas* dinyatakan dalam Al – Qur’an sebanyak 240 kali dan tersebar pada 53 surah. Kata *al – Nas* ditafsirkan sebagai eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan dan kekafirannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, hal ini

terdapat pada surah Al – Hujurat ayat 13 dengan terjemahan yang kurang lebih seperti berikut.

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Secara umum, penggunaan kata *al – Nas* memiliki arti peringatan dari Allah kepada manusia akan semua tindakannya, tindakan yang dilarang tersebut diantaranya berbuat zalim, terdapat pada surah Al – A’raf ayat 58 dengan terjemahan yang kurang lebih seperti berikut.

”Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: ‘Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah (yang haq) bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan dari manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

Wibowo (2010) *akhlaqul karimah* (perilaku terpuji) seorang muslim dibangun berdasarkan hubungannya sebagai manusia dengan Allah (*hablumminallah*) yang terkait dengan kewajibannya untuk melaksanakan serta patuh kepada perintah Allah S.W.T dan hubungannya antara sesama manusia (*hablumminannas*) yang terkait dengan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, baik manusia tersebut Muslim atau non-Muslim. Setiap muslim diharuskan menjaga dua hubungan ini, apabila seorang muslim menjaga kedua hubungan tersebut maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai muslim yang patuh.

Kriteria yang diharapkan dimiliki oleh seorang muslim yang terkait dengan hubungannya dengan Tuhan yaitu Memiliki pengetahuan enam rukun iman dan lima rukun Islam, Percaya pada kebenaran iman dan ibadah, Mengaplikasikan iman dan ibadahnya pada berkehidupan sehari-hari (Mansoer, 2008). Seorang muslim dengan perilaku terpuji (*akhlaqul karimah*) akan selalu berusaha untuk mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjadi manusia primer (*al insl fadhil*) (Mansoer, 2008). Seorang muslim yang mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-harinya akan sadar terhadap keberadaannya sebagai hamba Allah. Seorang muslim memiliki kondisi batin yang selalu terasa terkait dengan Allah. Seorang muslim akan selalu berusaha berkomitmen untuk mematuhi perintah Allah, sehingga semua ibadah, usaha, amal dan tindakannya hanya berorientasi untuk taat kepada Allah.

Tujuan penerapan ajaran agama Islam didasarkan pada konsep *ilahiah* (hubungan antara manusia dengan Tuhannya). Konsep *ilahiah* diterjemahkan ke dalam konsep kenabian dan alam semesta yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan alami (Husaini, 2013). Salah satu karakteristik syariah (hukum Islam) yaitu *syumulliyah* (memasukkan setiap syariat dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim) yang berjalan dengan konsep perilaku *hablumminannas*. *Hablumminannas* tepatnya tentang segala sesuatu di dunia dan di akhirat yang substansinya yaitu fakta hakikat kehidupan manusia (kepribadian, kebiasaan, peristiwa, dan sebab) yang selalu dikaitkan dengan konsep *ilahiah* (Hidayat, 2006). Dimensi pengajaran

Islam yaitu tentang aspek agama dan ibadah yang mencerminkan perilaku terpuji manusia (*akhlakul karimah*). Seorang muslim yang memiliki iman yang kuat, akan taat dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Muslim yang taat dalam ibadahnya, akan menjadi orang yang terpuji. Muslim yang terpuji akan memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, manusia lain dan alam sekitarnya yang disebut sebagai perilaku *hablumminannas*. Mansoer (2008) menjelaskan bahwa perilaku *hablumminannas* adalah perilaku etis yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam dan diwujudkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari manusia terhadap dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan alam. Perilaku *hablumminannas* diukur berdasarkan tiga dimensi ini (Mansoer, 2008).

Kepribadian seorang muslim terhadap dirinya diukur dari perilaku jujur, disiplin, dan ketekunan. Sikap kejujuran ialah cara yang penting karena individu biasanya berusaha menyembunyikan kesalahannya dan sulit untuk bersikap jujur. Kejujuran menunjukkan keberanian individu untuk mengakui kesalahan. Disiplin adalah konsistensi seseorang dalam melakukan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketekunan menunjukkan upaya yang konsisten individu untuk mencapai tujuannya, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, mencoba melakukan segalanya dengan upaya maksimal, tidak mudah puas diri, terus meningkatkan prestasinya, dan pekerja keras (Aisyah, 2014).

Kepribadian Islam terhadap sesama manusia diukur dari kebiasaan jujur, tolong menolong, bertanggungjawab, toleran, peduli, adil dan objektif serta

menghormati orang lain (Aisyah, 2014). Toleran menunjukkan dari kesediaan seseorang untuk membantu teman-teman dari berbagai etnis atau agama. Kepedulian terhadap orang lain menunjukkan dari kesediaan seseorang untuk merawat mereka yang tidak mampu merawat diri mereka sendiri, terutama orang tua dan orang sakit. Menghargai orang lain menunjukkan dari keengganan seseorang untuk mengganggu orang lain (Aisyah, 2014). Semakin tinggi kepribadian Islam terhadap dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan alam, semakin tinggi perilaku *hablumminannas* (Aisyah, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai independensi auditor telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Hudaib dan Haniffa (2008) meneliti dan mengeksplorasi independensi auditor di Arab Saudi dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan auditor pada negara Arab Saudi mengkonstruksikan independensi auditor dengan membaginya kepada 3 level interaksi sosial yaitu makro (kondisi politik, hukum, dan sosio ekonomi); meso (budaya organisasi dan *image management*); dan mikro (refleksivitas diri melalui norma dan etika yang ada).

Sucher dan Kosmala (2003) meneliti tentang realisasi dan konstruksi independensi auditor di Polandia. Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan konstruksi independensi auditor di Polandia dan menunjukkan realisasi lokal yang khusus. Tidak terdapat pengaruh antara budaya lokal dengan praktek akuntansi di Polandia.

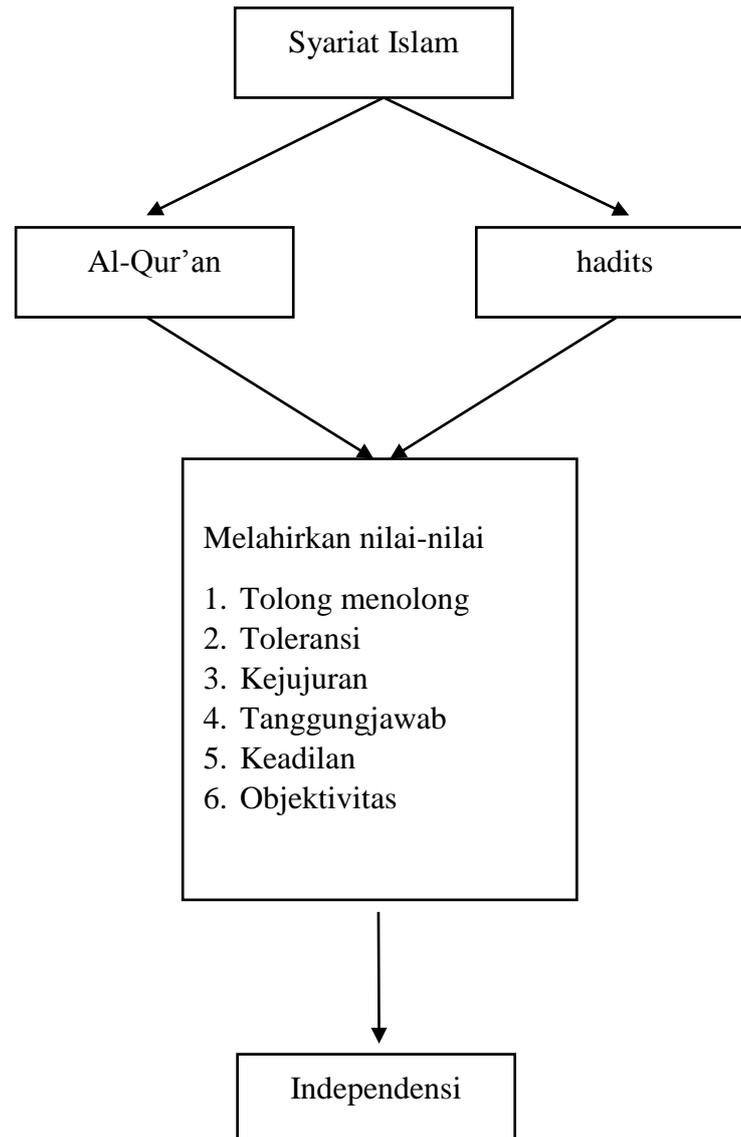
Sucher dan Kosmala (2002) meneliti tentang konstruksi independensi auditor di Republik Ceko melalui wawasan auditor independen di negara tersebut. Analisis yang dilakukan dengan memandang independensi auditor dari segi *de jure* dan *de facto* –nya yang terjadi di Ceko. Hasil penelitian dari segi *de jure* auditor di Ceko memandang independensi auditor sesuai dengan peraturan lama sebelum transisi ekonomi di Ceko. Untuk analisis *de facto* peneliti menemukan independensi auditor dipengaruhi dengan adanya isu baru terkait dengan regulasi yang mengatur KAP yang dimiliki oleh perorangan, regulasi tersebut terkait dengan provisi, layanan, dan rotasi auditor.

Sucher dan Bychkova (2001) meneliti independensi auditor dalam transisi ekonomi di Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan independensi auditor di Russia telah menjalankan sepenuhnya standar oleh IFAC untuk menjaga independensi auditor. Regulasi dari pemerintah perlu dibuat untuk mendasari penunjukkan dan pengunduran diri auditor untuk memperkuat independensi auditor. Pertumbuhan asosiasi profesional di Rusia mungkin tidak memberikan fokus yang jelas bagi auditor dalam pengaturan standar, kontrol dan penegakan kualitas audit dan independensi auditor.

Azis, Mangoting, dan Lutfillah (2015) meneliti independensi auditor dengan keindahan nilai-nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce*. Penelitian ini dilakukan pada auditor kota Makassar dengan mayoritas suku Bugis-Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan aktualisasi independensi auditor yang dimaknai dari simbolis-filosofis masyarakat Bugis-Makassar tertuang dalam konsep *siri' na pacce* yang meliputi nilai *siri'* (harga diri) dan nilai *pacce* (solidaritas).

Independensi Auditor yang mengedepankan nilai dari *sirri' na pacce* maka akan bertindak jujur, teguh pada keyakinan, berserah pada Tuhan, berkata benar dan saling memanusaiakan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an adalah kalam Allah S.W.T yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, sedangkan hadits adalah segala sesuatu yang diriwayatkan

oleh Nabi Muhammad S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan akhlak. Dalam Al-Qur'an dan hadits menjelaskan tentang kejujuran, amanah, integritas, komitmen, adil, dan tanggungjawab. Wibowo (2010) *akhlaqul karimah* (perilaku terpuji) seorang muslim dibangun berdasarkan hubungannya sebagai manusia dengan Allah (*hablumminallah*) yang terkait dengan kewajibannya untuk melaksanakan serta patuh kepada perintah Allah S.W.T dan hubungannya antara sesama manusia (*hablumminannas*) yang terkait dengan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, baik manusia tersebut Muslim atau non-Muslim. Setiap muslim diharuskan menjaga dua hubungan ini, apabila seorang muslim menjaga kedua hubungan tersebut maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai muslim yang patuh.

Kriteria yang diharapkan dimiliki oleh seorang muslim yang terkait dengan hubungannya dengan Tuhan yaitu Memiliki pengetahuan enam rukun iman dan lima rukun Islam, Percaya pada kebenaran iman dan ibadah, Mengaplikasikan iman dan ibadahnya pada berkehidupan sehari-hari (Mansoer, 2008). Seorang muslim dengan perilaku terpuji (*akhlaqul karimah*) akan selalu berusaha untuk mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjadi manusia primer (*al inslfadhil*) (Mansoer,2008). Seorang muslim yang mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-harinya akan sadar terhadap keberadaannya sebagai hamba Allah. Seorang muslim memiliki kondisi batin yang selalu terasa terkait dengan Allah. Seorang muslim akan selalu berusaha berkomitmen untuk mematuhi perintah Allah, sehingga semua ibadah, usaha, amal dan tindakannya hanya

berorientasi untuk taat kepada Allah (Aisyah, 2014). Kepribadian Islam terhadap sesama manusia diukur dari kebiasaan jujur, tolong menolong, bertanggungjawab, toleran, peduli, adil dan objektif serta menghormati orang lain (Aisyah, 2014). Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan independensi menurut kode etik, yaitu independensi menurut pemikiran dan penampilan.

Partner maupun auditor sebelum melakukan audit, partner maupun auditor tersebut melakukan perikatan berupa kontrak yang terdapat pada kegiatan perencanaan audit pada auditee. Auditor atau partner memberikan opini pada laporan keuangan auditee setelah menyelesaikan seluruh proses audit (Standar Audit IAPI, 2008). Seluruh proses audit dari perikatan sampai ke pemberian opini dibutuhkan sikap independensi dari seorang auditor atau partner. Kode etik profesi akuntan publik Indonesia (2018) mendefinisikan independensi pada dua aspek yaitu independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi sangat dibutuhkan untuk memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa independensi menurut auditor muslim adalah sikap yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun dengan tetap mempertimbangkan keadilan, integritas, hak serta kewajiban klien maupun auditor bertindak sesuai standar yang berlaku dengan menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam mengaudit, sedangkan auditor non-muslim, memasukkan pola hubungan pada definisi independensinya. Nilai-nilai Islam seperti tolong menolong sesama muslim dan toleransi dapat mengancam sikap independensi auditor muslim dalam batas-batas tertentu. Nilai-nilai seperti objektivitas, kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan dapat memperkuat sikap independensi seorang auditor muslim.

Auditor muslim diharapkan lebih menerapkan dan memiliki sikap untuk mempertahankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya sebagai auditor. Nilai-nilai Islam yang telah dimiliki oleh auditor tersebut dapat dengan mudah diterapkan dan dipertahankan dengan selalu menjalankan ibadah yang dilakukan oleh setiap individu auditor tersebut, selain itu KAP sebagai organisasi tempat auditor bekerja dapat menjalankan ibadah rutin secara kolektif atau bersama untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang dimiliki setiap anggotanya diantaranya dengan melakukan ibadah seperti wirid atau pengajian mingguan, pembiasaan dengan melakukan doa bersama sebelum memulai pekerjaan, atau menyelenggarakan kegiatan *idul qurban*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan sumber daya dan kurang akrabnya dengan informan
2. Waktu pelaksanaan penelitian yang kurang tepat
3. Sumber data yang digunakan hanya satu, yaitu wawancara

5.4 Saran

1. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya juga melakukan observasi sebagai sumber data lainnya selain dari wawancara.
2. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menambah tema dan sub tema yang akan diteliti, seperti pemahaman terhadap kode etik.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an.

Abd-Elsalam, O. H. and P. Weetman. 2003. "International Accounting Standards to an Emerging Capital Market: Relative Familiarity and Language Effect in Egypt". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12, 63-84.

Afrizal. 2015. "*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*". Jakarta:Rajawali Pers.

Agoes, Sukrisno & I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta:Salemba Empat.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

Aisyah, Muniaty. (2014). "The Influence of Religious Behavior On Consumer Purchase Halal Labeled." *Business and Entrepreneurial Review*. 14 (1), 15-32

Al Isra, Andi Batara. 2016. "Hablumminannas: Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar Ikhwan dan Akhwat Pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar". *Jurnal Etnosia*, 1 (2), 66-78

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Amani, Nani dan Sulardi. 2005. "Persepsi Akuntan Pendidik dan Praktisi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik dan Advertensi Jasa Kantor Akuntan Publik (Survei di Surakarta dan Yogyakarta)". *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. 5 (2). 137-148.

Amin, Mahir, 2014. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4 (2), 321-343.

Amir. 2011. "*Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*". Jakarta:Citra Harta Prima.

Arens, Alvin A. , Randal J. Elder, & Mark S. Beasley. 2014. *Auditing & Jasa Assurance (Pendekatan Terintegrasi)*. California: Pearson Education, Inc.

Aripoerwo, Rizal, Unti Ludigdo, & M. Achsin. 2014. Independensi Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(2), 314-344.

Ayuningtyas, Harvita Yulian. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Azis, Nur Alimin, Yenni Mangoting, & Novrida Qudsi Lutfillah. 2015. "Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Siri' Na Pacce*". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6 (1), 145-156
- Badan Pusat Statistik. 2010. Tabulasi Pemeluk Agama di Indonesia. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses 3 April 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/1521/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2018-tumbuh-5-27-persen.html>, diakses 21 Oktober 2018.
- Bakry, Oemar. 1981. *Akhlak Muslim*. Bandung:Angkasa.
- Blumer, Herbert. 1986. "Symbolic Inter-actionism; Perspective, and Method" London:University Of California Press Barkeley Los Angeles.
- Booth, A. (1998), *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Macmillan.Press Ltd, Basingstoke.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Burrell, G. & G. Morgan. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Heinemann: London.
- Central Intellegence Agency. 2014. "The World Factbook". <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html>, diakses 3 April 2018.
- Chan, S. Y., dan P. Leung. 2006. "The Effects Of Accounting Students' Ethical Reasoning And Personal Factors On Their Ethical Sensitivity". *Managerial Auditing Journal*, 2 (4), 436-457.
- Chua, W.F. (1988). "Interpretive Sociology and Management Accounting Research – a Critical Review." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 1 (2), 59-77.
- Clement, C.E., J.D. Neill, dan O. Stovall. 2012. "Inherent Conflicts Of Interest In The Accounting". *Journal of Applied Business Research*, 28 (2), 269–276.
- Deis Jr, D. R., dan G.A. Giroux. 1992. "Determinants of Audit Quality In The Public Sector". *Accounting Review*, 67 (3), 462-479.
- Dery, Tamyiez, 2002. "Keadilan dalam Islam." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18 (3), 337-351.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Efferin, S & Felizia Arni Rudiawarni. 2014. "Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11 (2), 138-164.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers
- Evans, L. 2004. "Language, Translation and the Problem of International Accounting Communication". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 17 (2), 210-248.
- Fearnley, S., V.A. Beattie, dan R. Brandt. 2005. "Auditor Independence And Audit Risk: A Reconceptualization". *Journal of International Accounting Research*, 4 (1), 39-71.
- Futri, Putu Septiani & Gede Juliarsa. 2014. "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali". *E-Jurnal Akuntansi*. 7(2).
- Gendron, Y., R. Suddaby, & H. Lam. 2006, "An examination of the ethical commitment of professional accountants to auditor independence", *Journal of Business Ethics*, 64 (2), 169-193.
- Goldman, A., dan B. Barlev. 1974. "The Auditor-Firm Conflict Of Interests: Its Implications For Independence". *Accounting Review*, 49 (4), 707-718.
- Gorman, F. and Ansong, G. (1998). "Perceptions of independence – do they change over time?". *International Journal of Auditing*. 2(3),185-196.
- Guna, Welvin I & Arleen Herawaty. 2010. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba ". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 12(1). 53-68.
- Halim, L. 2000, "Reviving the Indonesian Banking Sector? Indonesia's economic crisis: impact on financial and corporate sectors 1997-1999", Research Series No. 7, *The Institute of South East Asia Study*, Singapore.
- Hao, Z. (1999). "Regulation and organisation of accountants in China". *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 12(3), 286-302.
- Hidayat, Iman S., 2006. "Etos Kerja Sesuai Dengan Etika Profesi Islam." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 22 (1), 130-142.
- Hidayat, Iman. S. 2006. "Etos Kerja Sesuai Dengan Etika Profesi Islam". *Mimbar*, 22 (1), 130-142
- Hooks, Karen L. 2011. *Auditing & Assurance Service (Understanding The Integrated Audit)*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Hopper, T. & A. Powell. (1985). "Making Sense of Research Into The Organizational And Socialaspects of Management Accounting: a Review of Its Underlying Assumptions." *Journal of Management Studies*. 22(5), 429-465.
- Hopper, T., J. Storey, & H. Willmott. (1987). "Accounting For Accounting: Towards The Development of a Dialectical View." *Accounting, Organizations and Society*. 12 (5), 437-456.
- Hudaib, Mohammad & Roszaini Haniffa. 2008. "Exploring Auditor Independence: an Interpretive Approach". *Emerald Insight*, 22 (2), 221—246.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2018. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia*. Jakarta:Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2018. *Standar Audit*. Jakarta:Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Irmawan, Y., M. Hudaib, & R. Haniffa. (2013), "Exploring the perceptions of auditor independence in Indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4 (2), 173-202.
- Jonsson, S. & N.B. Macintosh. (1997). "CATS, RATS and EARS: Making The Case For Ethnographic Accounting Research." *Accounting, Organizations and Society*. 22 (3/4), 367-386.
- Kalana, Indraya *et al.* 2012. "Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blummer". *Symposium Nasional Akuntansi*. XV.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Auditor> , diakses tanggal 10 April 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Audit> , diakses tanggal 13 Oktober 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Objektivitas>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.
- Knapp, M. C. 1985. "Audit Conflict: An Empirical Study Of The Perceived Ability Of Auditors To Resist Management Pressure". *Accounting Review*, 60 (2), 202-211.
- Kosmala, K. (2007). "(Un)realised Independence In The CEE Region: Insights From Interpretive Cultural Theory". *Critical Perspectives on Accounting*. 18(3). 315-342.
- Law, P. 2008. "An Empirical Comparison Of Non-Big 4 And Big 4 Auditors' Perceptions Of Auditor Independence". *Managerial Auditing Journal*, 23 (9) 917-934.

- Linting, Indriyanti. 2013. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, Dan Kinerja Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Pada BRI Inspektorat Makassar. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi FEB Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mabruri, Havidz., & Jaka Winarna. 2010. “Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Maclulich, Katarzyna Kosmala & Pat Sucher. 2003. “A Local Realisation of Auditor Independence Construct in Poland: Counteracting ‘Iron Curtain’ Syndrome in Academic Writing”. *Elsevier*, 16, 593—612.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 1998. *Fiqh: Responsibilitas, Tanggungjawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Malisi, M. Ali Sibram. 2012. “Konsep Manusia Dalam Al – Qur’an”. *Jurnal Tasamuh*, 4 (2).
- Mansoer, Masri. 2008. Perilaku Keberagamaan Remaja Kasus Pada Siswa SLTA Di Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor.
- Meutia, Inten. 2004. “Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5”. *The Indonesian Journal and Accounting Research*. 7(3).
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munsi, Hardiyanti. 2013. Budaya Organisasi (Suatu Studi Etnografi Bank). *Skripsi*, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nata, Abuddin. 2005. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Oxford Learner’s Dictionaries.
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/independence>
[e 1?q=independence](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/independence), diakses tanggal 10 April 2018.
- Parker, L. & B. Roffey (1997) “Methodological Themes Back To The Drawing Board: Revisiting Grounded Theory and The Everyday Accountant’s And Manager’s Reality.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 10 (2), 212-247.
- Patel, *et al.* 2002. “Cultural Influences on Judgments of Professional Accountants in auditor-Client Conflict Resolution”. *Macquire University*. Sydney: Australia.
- Polit, D. I. 2010. “*Statistics and Data Analysis for Missing Research, 2nd ed. Pearson Education*”. NT:Upper Saddle River.
- Porter, B., Simon, J. and Hatherly, D. (2003), *Principles of External Auditing*, John Wiley & Sons, New York, NY.

- Power, M. (2003). "Auditing and the production of legitimacy". *Accounting, Organizations and Society*. 4, 379-394.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Kode Etik Dan Standar Audit*, Edisi Kelima.
- Puxty, A. (1993). "The social and organizational context of management accounting", in Otley, D. (Ed.), *The Advanced Management Accounting and Finance Series*. Academic Press:London.
- Puxty, A., Sikka, P. and Wilmott, H. (1997). "Mediating interests: the accountancy bodies' responses to the McFarlane Report". *Accounting and Business Research*. 27(4), 323-340.
- Rapina *et al.* 2010. "Pengaruh Independensi Eksternal Auditor Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit (Studi Kasus Beberapa KAP di Bandung)". *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*. No. 2.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Organizational Behaviour*. New Jersey:Prentice-Hall
- Robinson, T.A. & H. Rodriguez. 2006. *World Religions: A Guide to Essentials*. Peabody:MA:Hendrickson
- Salehi, M. 2009. "Non-Audit Service and Audit Independence: Evidences from Iran". *International Journal of Business and Management*. 4 (2). 142-152.
- Sarantakos, S. 1993. "Sosial Research". Melbourne:Mac Millan Education Australia Pty. Ltd
- Sari, Nungky Nurmali. 2011. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi Dan Etika Terhadap Kualitas Audit. *Thesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sucher, Pat & Kosmala-Maclulich. 2003. "A Construction of Auditor Independence in The Czech Republic: Local Insights". *Emerald Insight*, 17 (2), 276—305
- Sucher, Pat & Svetlana Bychkova. 2001. "Auditor independence in economies in transition: a study of Russia". *The European Accounting Review*, 10 (4), 817—841.
- Sudibyo, B. 2003. *Tinjauan dan Saran tentang Buku-buku Pemeriksaan Akuntansi*, Yogyakarta : BPF.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta:PT. Gunung Agung.
- Teoh, H. and Lim, C. (1996). "An Empirical Study of The Effects of Audit Committees, Disclosure of Non Audit Fees, and Other Issues On Audit

- Independence: Malaysian Evidence". *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*. 5(2), 231-248.
- Turner, L. E. 2006. "Learning From Accounting History: Will We Get It Right This Time?". *Issues in Accounting Education*, 2 (4), 383-407.
- Wahyuningsih, Sri. 2017. Pengaruh Independensi, Etika, Objektivitas Auditor, Profesionalisme dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang dan Yogyakarta) . *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Wardana, Made Aris & Dodik Ariyanto. 2016. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit". *E-Jurnal Akuntansi UNUD*, 14 (2). 948-976.
- Wibowo, Nugraha Agung. 2010. "Pengertian *Hablum Minallah Dan Hablum Minannas*." <http://mossdefcommunity.blogspot.com/2010/02/pengertian-hablumminallah-dan-hablum.html>. diakses tanggal 17 November 2019.
- Winarna, J. 2005. "Independensi Auditor: Suatu Tantangan di Masa Depan". *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. 5(2). 178-186.
- Wolnizer, P.W. (1987). *Auditing as an Independent Authentication*. Sydney University Press:Sydney.
- Wyatt, A.R. (2004), "Accounting Professionalism – they just don't get it!", *Accounting Horizons*, 18 (1), 45-53.

Padang, 6 Maret 2019


Saima

Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
- 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
- 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
- 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
- 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
- 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
- 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
- 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
- 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
- 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
- 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
- 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
- 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
- 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
- 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
- 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
- 1.2.2 Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
- 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
- 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?

Rinaldi Munaf
13/03/2019

Rinaldi

Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
 - 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
 - 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
 - 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
 - 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
 - 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
 - 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
 - 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
 - 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
 - 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
-
- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
 - 1.2.2 Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
 - 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
 - 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?

Hat
YANDRI HART

Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
 - 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
 - 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
 - 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
 - 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
 - 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
 - 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
 - 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
 - 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
 - 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
-
- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
 - 1.2.2 Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
 - 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
 - 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?

Suwardi-g-nawin



Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
 - 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
 - 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
 - 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
 - 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
 - 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
 - 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
 - 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
 - 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
 - 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
-
- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
 - 1.2.2 Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
 - 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
 - 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?

13/06/2019



Libi Gunawan

Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
 - 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
 - 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
 - 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
 - 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
 - 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
 - 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
 - 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
 - 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
 - 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
 - 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
 - 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
 - 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
-
- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
 - 1.2.2 .Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
 - 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
 - 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?

Pertanyaan Penelitian

Wawancara Terstruktur

Heri
David 15/6 2019

- 1.1.1 Pertanyaan Formalitas
- 1.1.2 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?
- 1.1.3 Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?
- 1.1.4 Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban?
- 1.1.5 Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik
- 1.1.6 Sudah terlaksanakah hak – hak tersebut?
- 1.1.7 Kira – kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
- 1.1.8 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak – hak tersebut?
- 1.1.9 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak – hak tersebut tidak terwujudkan?
- 1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
- 1.1.11 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?
- 1.1.12 Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
- 1.1.13 Kira – kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
- 1.1.14 Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?
- 1.1.15 Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajiban tersebut tidak terlaksana?
- 1.1.16 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan publik?

- 1.2.1 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
- 1.2.2 Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?
- 1.2.3 Kira – kira apa kelebihan kode etik tersebut?
- 1.2.4 Kira – kira apa kelemahan kode etik tersebut?